

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN
WAKTU PENERBITAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

PUJI KURNIA PUTRI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

This study aims to analyzing factors which influenced the timeliness of Indonesia's government. This study examine the size of region's government, financial independency of region's government, wealthiness of region's government, and audit opinion.

Sampling method is purposive sampling and there are 33 of region's government in Indonesia. Using the secondary datas, which are the report financial investigation result of region's government in 2009-2013. There is interview analysis in one of the sample for making the hypotesis stronger.

The result of this study shows that the financial independency of region's government and audit opinion significantly positive to the timeliness, and region's government size and the wealthiness doesn't significant with the timeliness.

Keywords: Timeliness, region's government size, financial independency of region's government, wealthiness of region's government, and audit opinion.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pada pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Faktor–faktor yang diteliti adalah ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah. Kekayaan pemerintah daerah dan opini audit.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 33 pemerintah daerah provinsi se–Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2009-2013. Peneliti ini juga menggunakan tambahan analisis wawancara pada salah satu sampel penelitian (Provinsi Lampung). Tambahan analisis ini bertujuan untuk memperkuat bukti hipotesis yang telah dilakukan pengujian dengan regresi logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

Kata Kunci : Ketepatan waktu, ukuran pemda, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemda dan opini audit.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN
WAKTU PENERBITAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH
INDONESIA**

Oleh

Puji Kurnia Putri

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016

Judul Skripsi

: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHI KETEPATAN WAKTU
PENERBITAN LAPORAN HASIL
Pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Seluruh Indonesia**

Nama Mahasiswa

: **Puji Kurnia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1211031076

Jurusan


: Akuntansi

Fakultas

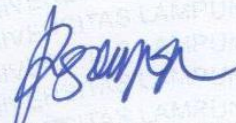
: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Fajar Gustiawaty D, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001



Pigo Nauli, S.E., M.Sc.
NIP 19820623 200812 1 001

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**



Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

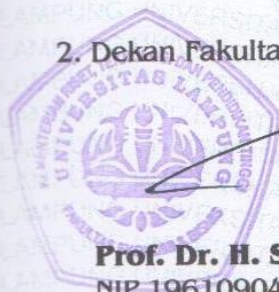
1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty D, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.

Penguji Utama : R. Weddie A, S.E., M.Si., CA., CPA.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Kurnia Putri

NPM : 1211031076

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2016



Puji Kurnia Putri

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 09 Desember 1994 sebagai putri kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Erlan Murdiantono dan Yurida Herawati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Kanak-Kanak di TK Darmawanita Kalianda, Lampung Selatan pada Tahun 2000, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar di SD Negeri 3 Way Urang Kalianda dan lulus Tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalianda yang diselesaikan pada Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1 Kalianda hingga lulus pada Tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar menjadi pengurus IFL (Indonesian Future Leaders) periode 2015/2016 diamanahkan sebagai Bendahara IFL. Selain itu, penulis juga aktif dalam UKMF KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) sebagai anggota pada periode 2012-2013.

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini.

Karya ini kupersembahkan kepada:

**Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Erlan Murdiantono dan Ibunda
Yurida Herawati.**

**Saudara Sekandung Puji Permata Utami, Puji Indah Permatasari dan
Muhammad Puji Prawiroyudo**

Teman dan Sahabat Tersayang

Keluarga Besar Jurusan Akuntansi

Serta

Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

MOTO

“Jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”

--- Imam Asy-Syafi'i---

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS AL – Insyirah,6-7)

“Dalam hidup, jangan miliki rasa takut pada dia yang membencimu, tapi kamu harus hati – hati pada teman yang pura-pura memelukmu”

---Ken---

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr.Fajar Gustiawaty D, S.E., M.Si., Akt sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi.
6. Bapak R.Weddi Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Dosen Penguji, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Orang tuaku tersayang: Ayahanda Ir. Erlan Murdiantono, M.M dan Ibundaku Dra. Yurida Herawati, serta kakak dan adiku tersayang Puji Permata Utami, Puji Indah Permatasari dan Muhammad Puji Prawiroyudo, atas semua limpahan kasih sayang, doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan hingga tercapai penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak-kakak terbaikku: Deri Aznelia, Ardilah Refiantari, Ahmad Rizki Hardinata, Trianto Satria, Varian Rolanda, Ica Rizki, Nadia Arlin, Mutia Ane, Nabila Ilna, Desi Setianingrum, Trihana Pratiwi, Tan Jessica dan Aris Syofyan yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan lancar.

11. Sahabat karibku: Dian Riyanti, Yuni Elistiawati, Masayu Laila, Dewi Isratul, Della Marina, Meli Maulinda, Inayah dan Amaliah semoga selalu terjaga kekerabatan ini.
12. Untuk wanita-wanita terbaik, tersabar dan selalu menjadi motivasi untuk selalu semangat para Gelinaks: Sri Wahyuni, Mia Meisiska, Muthia Prima N, Elia Rahma P, dan Evi Krismayanti, terimakasih atas semua bantuan yang selama ini kalian berikan, dukungan semangat yang selalu mengalir, kesabaran yang selalu ada *Love you girls!*
13. Untuk persahabatan Konyas tersayang : Mutia Marganita, Elia Rahma P, Dian Kusuma D, Elvi Riali, Rossinda Budianti, Susi Bagus Z, Evi Krismayanti, Melfriani Amelia S dan Rahmah Khairina terimakasih untuk semua kesabaran kalian, nasehat kalian, dukungan kalian, selalu ada disaat suka maupun duka pokoknya kalian *The best I ever had!*
14. Untuk para tutor : Ferly Herdiansyah, Faktur Rahamn, Rexi Rosandi, Syafri Alfizar dan Rizki Putera Kusuma terimakasih untuk nasehat yang kalian berikan semoga dimudahkan dalam segala hal.
14. Teman-teman sejawat Akuntansi 2012: *girlband's member* (Kiky, Priska, Shaumi, Trida), Para cabay terhitz (Citra Janencia, Ayu Aisyah dan Widya Maulin) Eva, Nurul, Dila, Sakinah, Intan, Mafiana, Anggie, Fatur, Bima dan Opi Terimakasih untuk sudah bersama-sama berjuang di bangku perkuliahan.
15. Keluarga IFL Terbaik terutama untuk Ratih Jualia Sari, Kak Desi, Kak Hana, Kak Jeje, Kak Candra, Kak Emi, Kak Hety, Kak Deni , Kak Opin, Kak Aris, Terimakasih untuk pengalaman hidup dan pelajaran hidup terbaik yang kalian berikan!
16. Kelompok KKN Mulya Asri Nurul, Denty, Kak Lian dan Yasin terimakasih atas dukungan dan pengalamannya, semoga kalian sukses!

17. Seluruh teman, kerabat dan pihak lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu, kalian semua luar biasa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari.

Bandar Lampung, 21 Juni 2016

Penulis

Puji Kurnia Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

| | |
|------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 9 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 10 |

II. LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| 2.1 Landasan Teori..... | 12 |
| 2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan | 12 |
| 2.1.2 Teori Kepatuhan dalam Pemerintahan | 13 |
| 2.1.3 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik | 14 |
| 2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan | 15 |
| 2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah | 17 |
| 2.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah | 17 |
| 2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah | 18 |
| 2.2.4 Jenis- Jenis Pendapat Auditor | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 20 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 21 |
| 2.5 Pengembangan Hipotesis | 22 |
| 2.5.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan waktu | 22 |
| 2.5.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Ketepatan waktu | 23 |
| 2.5.3 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan waktu | 24 |
| 2.5.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan waktu | 24 |

III.METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Jenis dan Sumber Data | 26 |
| 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian | 26 |
| 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 27 |
| 3.3.1 Variabel Dependen | 27 |
| 3.3.2 Variabel Independen..... | 27 |
| 3.4 Metode Analisis Data | 29 |
| 3.4.1 Uji Statistik Deskriptif..... | 29 |
| 3.4.2 Uji Asumsi Klasik | 30 |
| 3.4.2.1 Uji Multikolinieritas..... | 30 |
| 3.4.2.2 Uji Autokorelasi | 30 |
| 3.5 Uji Hipotesis..... | 31 |

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Data dan Sampel..... | 34 |
| 4.2 Statistik Deskriptif..... | 35 |
| 4.3 Hasil dan Pengujian Asumsi Klasik | 37 |
| 4.3.1 Uji Multikolinieritas | 37 |
| 4.3.2 Uji Autokorelasi | 38 |

| | |
|---|----|
| 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis | 39 |
| 4.4.1 Menilai Kelayakan Model Regresi | 39 |
| 4.4.2 Menilai keseluruhan Model | 39 |
| 4.4.3 Hasil Uji Koefesien Regresi Logistik..... | 41 |
| 4.5 Pembahasan..... | 43 |
| 4.5.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan waktu | 43 |
| 4.5.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Ketepatan waktu | 44 |
| 4.5.3 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan waktu | 45 |
| 4.5.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan waktu | 46 |

V. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 5.1 Simpulan..... | 48 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 49 |
| 5.3 Saran..... | 50 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 1.1 | Tanggal LHP LKPD TA 2011 – 2013 | 03 |
| 4.1 | Kriteria Penerimaan Sampel | 34 |
| 4.2 | Descriptive Statistics | 35 |
| 4.3 | Hasil Uji Multikolinieritas | 37 |
| 4.4 | Hasil Uji Autokorelasi..... | 38 |
| 4.5 | Hosmer and Lemeshow Test..... | 39 |
| 4.6 | Nilai -2 Likelihood | 40 |
| 4.7 | Model Summary | 40 |
| 4.8 | Variabel dalam Persamaan | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|----------------------------|---------|
| 1 Kerangka Pemikiran | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Surat Izin Wawancara
- 2 Pertanyaan Wawancara
- 3 Hasil Wawancara
- 4 Laporan Wawancara
- 5 Tabulasi Data Sampel Penelitian
- 6 Ketepatan Waktu LHP LKPD
 - a. Ketepatan Waktu LHP LKPD tahun 2009
 - b. Ketepatan Waktu LHP LKPD tahun 2010
 - c. Ketepatan Waktu LHP LKPD tahun 2011
 - d. Ketepatan Waktu LHP LKPD tahun 2012
 - e. Ketepatan Waktu LHP LKPD tahun 2013
- 7 Ukuran Pemerintah Daerah
- 8 Kemandirian Keuangan Daerah
- 9 Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- 10 Kekayaan Pemerintah Daerah
- 11 Opini Audit
 - a. Opini Audit tahun 2009
 - b. Opini Audit tahun 2010
 - c. Opini Audit tahun 2011
 - d. Opini Audit tahun 2012
 - e. Opini Audit tahun 2013
- 12 Logistic Regression

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di pemerintahan Indonesia umumnya dituntut untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen yang penting untuk dapat memberikan informasi kepada publik agar dapat dijadikan sebagai fungsi informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak luar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa informasi yang telah disajikan oleh pemerintah daerah dapat bermanfaat jika informasi yang disajikan secara: (a) relevan dalam hal ini relevan berkaitan dengan manfaat informasi yang disajikan dan tepat waktu penyajian laporan keuangannya, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Salah satu ciri khusus akuntansi sektor publik adalah ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan (Mandiasmo, 2009).

Peraturan perundang-undangan yang memberikan bukti tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pemberlakuan undang-undang tentang akuntansi pemerintah yang ada ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan di sektor pemerintahan. Terbukti banyaknya keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari yang seharusnya batasan waktu yang ditegaskan oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan agar diperiksa selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

Berdasarkan peraturan tersebut masih terdapat pemerintahan provinsi yang tidak tepat waktu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah karena tidak sesuai dengan batasan waktu peraturan yang ada. Menurut tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan terdapat persentase ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan yang bervariasi dengan keterlambatan laporan hasil pemeriksaan yang ada. Data terkait dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Tanggal LHP LKPD TA 2011-2013

| No | Nama Provinsi | Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK | | | Tepat Waktu (%) |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSALAM | 21 SEPT 2012 | 24 JULI 2013 | 21 MEI 2014* | 33% |
| 2 | SUMATERA UTARA | 16 MEI 2012* | 13 MEI 2013* | 16 MEI 2014* | 100% |
| 3 | SUMATERA BARAT | 12 MEI 2012* | 6 MEI 2013* | 24 APRIL 2014* | 100% |
| 4 | RIAU | 1 MEI 2012* | 7 MEI 2013* | 8 MEI 2014* | 100% |
| 5 | KEPULAUAN RIAU | 18 MEI 2012* | 17 MEI 2013* | 12 MEI 2014* | 100% |
| 6 | JAMBI | 19 APRIL 2012* | 7 MEI 2013* | 19 MEI 2014* | 100% |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 22 MEI 2012* | 11 JUNI 2013 | 13 JUNI 2014 | 33% |
| 8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 29 MEI 2012* | 12 JUNI 2013 | 6 JUNI 2014 | 33% |
| 9 | BENGKULU | 26 MEI 2012* | 24 MEI 2013* | 21 MEI 2014* | 100% |
| 10 | LAMPUNG | 19 JUNI 2012 | 28 MEI 201* | 23 JUNI 2014 | 33% |
| 11 | DKI JAKARTA | 29 MEI 2012* | 27 MEI 2013* | 19 JUNI 2014 | 67% |
| 12 | JAWA BARAT | 25 MEI 2012* | 24 MEI 2013* | 26 MEI 2014* | 100% |
| 13 | BANTEN | 29 MEI 2012* | 28 JULI 2013 | 28 MEI 2014* | 67% |
| 14 | JAWA TENGAH | 24 MEI 2012* | 24 MEI 2013* | 10 MEI 2014* | 100% |
| 15 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 16 MEI 2012* | 27 MEI 2013* | 13 ME 2014* | 100% |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|
| 16 | JAWA TIMUR | 6 MEI 2012* | 5 MEI 2013* | 5 MEI 2014* | 100% |
| 17 | BALI | 28 MEI 2012* | 30 MEI 2013* | 28 MEI 2014* | 100% |
| 18 | NTB | 9 MEI 2012* | 5 MEI 2013* | 21 MEI 2014* | 100% |
| 19 | NTT | 14 JUNI 2012 | 26 JULI 2013 | 3 JUNI 2014 | 0% |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 13 MEI 2012* | 24 MEI 2013* | 16 JUNI 2014 | 67% |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 24 JULI 2012 | 13 MEI 2013* | 19 JUNI 2014 | 33% |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4 JUNI 2012 | 7 JUNI 2013 | 26 JUNI 2014 | 0% |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 23 JUNI 2012 | 30 MEI 2013* | 6 JUNI 2014 | 33% |
| 24 | SULAWESI BARAT | 15 JUNI 2012 | 28 JUNI 2013 | 16 JUNI 2014 | 0% |
| 25 | SULAWESI TENGAH | 16 MEI 2012* | 30 APRIL 2013* | 6 MEI 2014* | 100% |
| 26 | SULAWESI TENGGARA | 14 MEI 2012* | 28 APRIL 2013* | 10 MEI 2014* | 100% |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 25 MEI 2012* | 1 MEI 2013* | 23 MEI 2014* | 100% |
| 28 | GORONTALO | 29 JUNI 2012 | 31 MEI 2013* | 26 MEI 2014* | 67% |
| 29 | MALUKU | 22 MEI 2012* | 4 JUNI 2013 | 22 MEI 2014* | 67% |
| 30 | MALUKU UTARA | 29 JUNI 2012 | 30 JULI 2013 | 4 JULI 2014 | 0% |
| 31 | PAPUA BARAT | 31 AGUSTUS 2012 | 20 AGUSTUS 2013 | 19 AGUSTUS 2014 | 0% |
| 32 | PAPUA | 15 MEI 2012* | 6 JULI 2013 | 1 JUNI 2014 | 33% |
| 33 | SULAWESI UTARA | 29 MEI 2012* | 13 JUNI 2013 | 23 JULI 2014 | 33% |

Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (2009-2013)*

Keterangan : *)*Laporan keuangan yang tepat waktu*

Berdasarkan tabel mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, maka terlihat persentase ketepatan waktu yang bervariasi dari seluruh pemerintahan provinsi yang dijadikan sebagai contoh fenomena untuk dapat melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Terlihat hampir semua pemerintah seluruh provinsi melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu namun masih terdapat

beberapa provinsi yang mengalami keterlambatan dalam penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disajikan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Sukoco, 2013). Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dipublikasikan tepat waktu berpengaruh terhadap pihak luar untuk dijadikan pengambilan keputusan. Peneliti tertarik untuk dapat membuktikan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah sehingga dapat menjadikan laporan keuangan hasil pemeriksaan dapat tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Penelitian ini dimodifikasi dari Kartiko (2015) yang menguji pengaruh opini audit, kualitas auditor, dan sistem informasi yang terintegrasi terhadap keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah dengan sampel pemerintah daerah selama tahun anggaran 2011-2012.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah dengan melakukan analisis ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan memperluas sampel yang dilakukan selama tahun 2009-2013 di seluruh provinsi Indonesia.

Penelitian tentang ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah masih relatif jarang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ketepatan waktu biasa dilakukan dengan menggunakan data primer, bahwa ketepatan waktu dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi

informasi (Desmiyawati, 2014). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa opini audit WTP, jenjang pendidikan Strata 2 akuntansi manajer audit, sertifikasi profesional di bidang audit, dan penyelenggaraan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara signifikan mampu menekan jangka waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD (Kartiko, 2015).

Peneliti Sutaryo dan Carolina (2014) membuktikan ukuran pemerintah yang diukur menggunakan aset menunjukkan hubungan yang berpengaruh terhadap keterlambatan waktu penetapan APBD. Menurut Modugu (2012) ukuran pemerintahan yang diukur menggunakan total aset menunjukkan hubungan yang positif terhadap *audit delay*. Penelitian Ina (2015) membuktikan bahwa ukuran pemerintah yang diukur menggunakan total aset menunjukkan hubungan yang tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian Fachrurozi (2014) menjelaskan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah yang diukur menggunakan total pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan menunjukkan hubungan yang berpengaruh terhadap *audit delay* di pemerintahan daerah. Sedangkan menurut penelitian Ina (2015) variabel kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah dibagi dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi pinjaman menunjukkan hubungan yang tidak berpengaruh terhadap *audit delay* di pemerintahan. Penelitian ini menguji variabel kemandirian keuangan daerah terhadap ketepatan waktu.

Penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menjelaskan bahwa variabel kekayaan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli

daerah menunjukkan hubungan yang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan. Menurut penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) kekayaan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah menunjukkan hubungan yang positif terhadap pengungkapan LKPD. Penelitian ini menguji variabel kekayaan pemerintah daerah yang relatif jarang digunakan dalam pengukuran ketepatan waktu untuk data sekunder.

Penelitian Kartiko (2015) menjelaskan bahwa variabel opini audit yang diukur dengan menggunakan *dummy* variabel ketika WTP diberi nilai 1 dan selain WTP diberi 0 menunjukkan hubungan terhadap keterlambatan LHP LKPD. Sedangkan penelitian Ilna (2015) menjelaskan bahwa opini audit diukur dengan menggunakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi kode 1, opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit Tidak Wajar (TW) diberi kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberi kode 4.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah karena terdapat perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Modugu (2012) dan Ilna (2015) menggunakan total aset dalam pengukuran ukuran pemerintahan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian Modugu (2012) dan Ilna (2015) yang menggunakan total aset.

Pengukuran variabel kemandirian keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Fachrurozi (2014) yang menggunakan total pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan sebagai alat ukur kemandirian keuangan daerah.

Variabel pendapatan asli daerah variabel ini relatif jarang digunakan dalam penelitian ketepatan waktu yang menggunakan data primer. Hal ini membuat peneliti ingin menguji variabel pendapatan asli daerah dengan menggunakan data sekunder dan memperluas sampel penelitian. Penelitian ini mengacu pada Trisnawati dan Komarudin (2014) yang menggunakan pendapatan asli daerah terhadap publikasi laporan keuangan.

Terdapat perbedaan alat ukur variabel opini audit yang digunakan Kartiko (2015) yang menggunakan *dummy* ketika WTP 1 dan selain WTP 0 dan Penelitian Ina (2015) yang menggunakan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi kode 1, opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit Tidak Wajar (TW) diberi kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberi kode 4. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ina (2015) yang menggunakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi kode 1, opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi kode 2, opini audit Tidak Wajar (TW) diberi kode 3 dan untuk opini audit Tidak Memberi Pendapat (TMP) diberi kode 4.

Peneliti akan menguji ketepatan waktu di pemerintahan daerah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK sehingga cakupan sampel pada penelitian ini akan lebih luas dengan menggunakan pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia. Peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia”

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Telah diuraikan diatas terdapat pemerintah daerah melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap penerbitan LHP LKPD, maka peneliti akan meneliti yang akan dirumuskan dalam pertanyaan antara lain:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.
2. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.
3. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.
4. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan hasil pemeriksaan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain peneliti hanya menggunakan empat variabel dalam penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit tahun 2009-2013 pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemeriksaan.
2. Untuk menganalisis bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemeriksaan.
3. Untuk menganalisis bahwa kekayaan pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemeriksaan.
4. Untuk menganalisis bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemeriksaan.

1.5 Manfaat Penelitian

a) Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia dan juga dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan aspek dalam bidang ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit dalam menyajikan

informasi pelaporan keuangan dengan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penerbitan LHP LKPD.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Halim dan Abdullah (2010) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan kewenangan atau kekuasaan disebut prinsipal dan yang menerima kewenangan disebut agen. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dapat ditunjukkan melalui hubungan rakyat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen. Hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat yang menggunakan pemerintah untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat.

Teori keagenan berfokus dalam mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu dengan tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko

yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Pengaruh teori agensi terhadap ketepatan waktu dipemerintahan yaitu ketika pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan melakukan transparansi laporan keuangan agar terhindar dari pertentangan masyarakat untuk lebih mempercayakan hasil kinerja yang telah diberikan agen dalam melaporkan transparansi pelaporan keuangan untuk pihak prinsipal.

2.1.2 Teori Kepatuhan dalam Pemerintahan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Fachrurozi, 2014).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Rosalin, 2011). Pengaruh teori kepatuhan terhadap ketepatan waktu sudah harus diterapkan karena penyajian laporan keuangan diakuntansi pemerintahan memiliki peraturan entitas pelaporan sesuai dengan tanggal pertanggungjawaban yang dipertegaskan oleh peraturan perundang - undangan

pemendagri karena akuntansi pemerintahan memiliki pertanggung jawaban terhadap peraturan perundang – undangan yang harus dipatuhi dan dipertanggungjawabkan terhadap penyajian pelaporan keuangannya.

2.1.3 Laporan Keuangan di Organisasi Sektor Publik

Banyak pihak yang melaporkan laporan keuangan hasil transaksi untuk dijadikan informasi dalam laporan keuangan untuk dipublikasikan oleh pemerintah daerah agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan pokok pertanggungjawaban meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK yaitu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK yaitu laporan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

2.2. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Menurut Chamber dan Penman (1984) dalam Hilmi dan Ali (2008) ketepatan waktu dapat didefinisikan dalam dua cara yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu

pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan (Fachrurozi, 2014). Ketepatan waktu adalah rentang waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit kepada publik sejak tahun anggaran berakhir.

Penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK agar dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dengan batasan waktu dua bulan sejak diterima laporan keuangan dari pemerintah, karena tanggal penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap waktu laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah daerah yang menyerahkannya dengan tepat waktu akan berpengaruh terhadap tanggal penerbitan waktu laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK akan berpengaruh terhadap penyajian informasi yang akan disampaikan dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan tanggal penerbitan tidak tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dan mempengaruhi kualitas keputusan.

2.2.1 Ukuran Pemerintahan Daerah

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut, organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan dari pada organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Ukuran pemerintah merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Ilna, 2015). Pemerintah daerah memiliki aset dengan jumlah yang besar akan mampu menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu karena pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar akan menjadi perhatian auditor dalam melakukan pemeriksaanya.

2.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

(Fachrurozi, 2014). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2011: L-5).

Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan daerahnya berpengaruh terhadap kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan tepat waktu dan auditor akan cepat melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemda menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut (Sinaga, 2011). Pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu, 2005). Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah berasal dari:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai Perubahan dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan meliputi: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang besar yang dimiliki pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Ketika pemerintah memiliki PAD yang besar masyarakat akan lebih cenderung untuk meminta transparansi laporan keuangan yang pemerintah lakukan agar

terhindar dari penyalahgunaan dan LHP LKPD akan diterbitkan dengan tepat waktu.

2.2.4 Jenis-jenis Pendapat Auditor

Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksaan atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksaterdiri dari: 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian, 3) Opini Tidak Wajar, 4) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (BPK, 2008).

2.3 Penelitian Terdahulu

Fachururozi (2014) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemeritah daerah di Indonesia hasil yang didapat bahwa pengujian secara simultan menyimpulkan semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 25 persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada lima dari delapan faktor yang berpengaruh terhadap audit delay, yaitu pengalaman, tingkat kemandirian, kemampuan keuangan, lokasi, dan temuan audit.pengalaman pemerintah daerah, tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah, lokasi, ukuran entitas, akuntabilitas kinerja, temuan audit dan jumlah entitas pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pemerintah daerah.

Setyaningrum dan Syahfitri (2012) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengukapan laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan

bahwa ukuran legislatif, umur administrasi pemda, kekayaan pemda dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintahan daerah.

Ilna (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay* pemerintah daerah se-Indonesia yang didapat menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit *delay* pemerintah daerah.

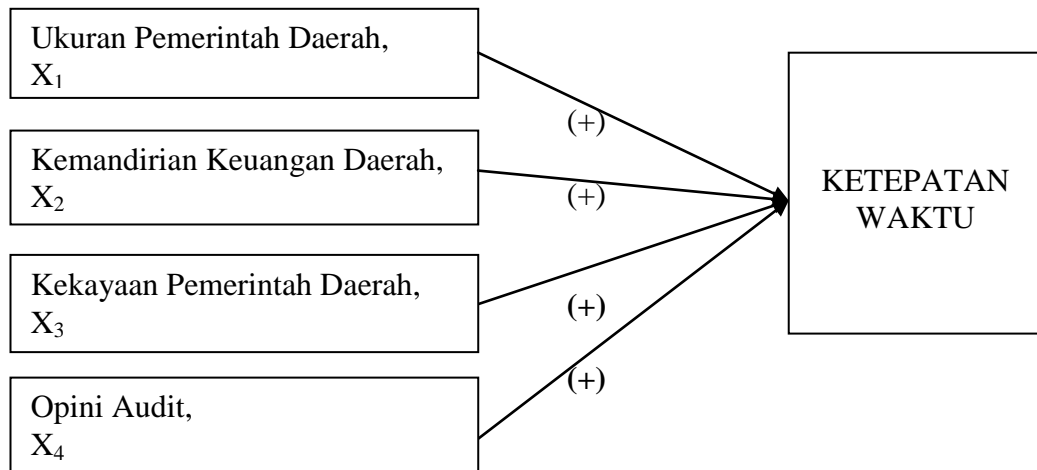
Kartiko (2015) meneliti pengaruh opini audit WTP, jenjang pendidikan Strata 2 akuntansi manajer audit, sertifikasi profesional di bidang audit, dan penyelenggaraan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara signifikan mampu menekan jangka waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD .

Dari uraian diatas dan didapatkan hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitian mengenai ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, maka peneliti ingin melihat kembali beberapa faktor yang menyebabkan tidak ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat empat faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penerbitan

laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit. Berikut adalah keangka pemikiran dari penelitian ini.



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan Waktu

Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Sutaryo dan Caroline (2014) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Menurut Modugu (2012) ukuran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar dituntut mampu menyusun transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan tepat waktu. Ketika aset yang dimiliki pemerintah daerah besar maka auditor akan mempercepat proses penyelesaian kegiatan pemeriksaan yang akan berpengaruh terhadap penerbitan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, mengingat pengelolaan aset daerah seiring menjadi perhatian

auditor Badan Pemeriksaan Keuangan agar terhindar dari penyalahgunaan aset dipemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu.

2.5.2 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu

Fachrurozi (2014) menjelaskan bahwa sebuah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas hasil penelitiannya menunjukkan kemandirian berpengaruh terhadap *audit delay*. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya kemampuan pemerintah daerah yang tinggi untuk menunjukkan kemandirian terhadap kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan laporan keuangannya.

Kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dan peran pemerintah dalam kemampuan meningkatkan kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik untuk pemerintah daerah salah satu indikasinya adalah ketepatan penyampaian laporan keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat mendukung kerjasama yang baik antara pemda dalam penyerahan LKPD karena auditor akan melakukan pemeriksaan dengan tepat sesuai dengan peraturan agar berpengaruh terhadap LHP LKPD pemerintah daerah yang tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu.

2.5.3 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan Waktu

Trisnawati dan Komarudin (2014) menjelaskan bahwa kekayaan pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemda dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemda hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah yang cukup besar akan dituntut untuk melakukan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu. Ketika pemerintah daerah yang memiliki PAD yang lebih besar akan memaksimalkan sumber daya untuk melakukan transparansi dan laporan ketepatan waktu karena pendapatan asli daerah yang besar rentan akan penyalahgunaan oleh karena itu auditor akan menyegerakan proses penyelesaian kegiatan pemeriksaan. Agar dapat memberikan bukti kepada masyarakat bahwa tidak ada penyalahgunaan PAD dan penerbitan laporan hasil pemeriksaan akan tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu.

2.5.4 Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu

Payne dan Jensen (2000) dalam Muladi (2014) menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang berupa opini non WTP (yaitu

WDP, TW, atau TMP) dapat menjadi informasi catatan yang buruk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Auditor akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dan mempertimbangkan serangkaian tambahan prosedur terkait laporan keuangan yang diyakini secara wajar dalam hal material. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2009-2013.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi untuk dilakukan penelitian adalah pemerintah daerah seluruh provinsi di Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dengan kriteria antara lain:

1. Menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi secara lengkap sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada tahun 2009-2013.
2. Menyajikan tanggal hasil opini audit dari BPK.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah ketepatan waktu yang menunjukkan batasan waktu dalam melaporkan laporan keuangan ketika tanggal hasil pemeriksaan diterbitkan. Variabel ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan yang telah dikeluarkan dari hasil opini audit setelah dilakukannya pemeriksaan oleh BPK selambat lambatnya 2 bulan ketika penyerahan LKPD dari pemerintah daerah kepada BPK paling lambat 31 Maret. Variabel ini menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 untuk tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan BPK yang tepat waktu, sedangkan 0 untuk tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak tepat waktu.

Menurut peraturan Pemandagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1). Peneliti ini menggunakan pengukuran ketepatan waktu dengan tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan BPK dihitung kurang dari 150 hari sejak berakhirnya tahun anggaran.

3.3.2 Variabel Independen

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Sumarjo (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri Desember (2012) maka untuk mengukur ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\boxed{\text{Total Aset}}$$

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Rizkiano (2011) dalam Fachrurozi (2014) Tingkat kemandirian pemerintah daerah memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya dan dinyatakan dalam persen.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Fachrurozi (2014) maka untuk mengukur kemandirian pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\boxed{\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}}$$

3. Kekayaan Pemerintah Daerah

Sinaga (2011) menggunakan kekayaan pemda karena menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut. PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan

yang berasal dari pemerintah itu sendiri yang mencerminkan kekayaan daerah (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri Desember (2012) maka untuk mengukur kekayaan pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

| |
|------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah |
|------------------------|

4. Opini Audit

Opini audit dapat diukur berdasarkan pendapat yang diberikan oleh auditor :

4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 3) Opini Wajar Dengan Pengecualian, 2) Opini Tidak Wajar, 1) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat.

3.4 Metode Analisis Data

Data yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan ini kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan autokorelasi. Karena menurut (Ghozali, 2013) metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (nominal atau non metrik) dan variabel independennya kombinasi atau campuran antara metrik dan non metrik hal ini dapat dianalisis dengan logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Kemudian menurut Gujarati (1995) dalam Sulisty (2010) menyatakan bahwa *logistic regression* juga mengabaikan masalah *heteroscedacity*, artinya disini variabel dependen tidak memerlukan *homoscedacity* untuk masing-masing variabel independennya.

3.4.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas di dalam model regresi. Multikolinieritas dapat disebabkan oleh adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *variance inflation faktor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2013).

3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

3.5 Uji Hipotesis

Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak, pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi logistik (*logistic regression*) karena menurut (Ghozali, 2012: 9) metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (nominal atau non metrik).

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Dalam hal ini dapat dianalisis dengan *Logistic Regression* karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya (Ghozali, 2012).

Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

$$Y = \frac{TW}{1-TW} = a + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \epsilon$$

Keterangan:

$$\frac{TW}{1-TW}$$

: *Dummy* variabel ketepatan waktu (kategori 0 untuk tanggal hasil pemeriksaan yang tidak tepat waktu yang tepat waktu dan kategori 1 untuk tanggal hasil pemeriksaan yang tepat waktu yang tepat waktu).

a

: Konstanta

β_1 Ukuran

: Ukuran Pemerintah Daerah

β_2 Kemandirian

: Kemandirian Keuangan Daerah

β_3 Kekayaan : Kekayaan Pemerintah Daerah
 β_4 Opini Audit : Opini Auditor
 ε : Error

Menurut Ghozali (2013) didalam analisis pengujian dengan *logistic regression* perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Menilai Kelayakan Model Regresi

Perhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow* dengan hipotesis:

H0 = Model yang dihipotesakan fit dengan data.

H1 = Model yang dihipotesakan tidak fit dengan data.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan memperhatikan nilai *goodness of fit* yang diukur dengan nilai *Chi-Square* pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow* dimana, jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima sedangkan jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (Ghozali, 2013).

2. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Perhatikan angka *-2 Log Likelihood* (LL) pada awal (block number = 0) dan angka *-2 Log Likelihood* pada block number = 1. Jika terjadi penurunan angka *-2 Log Likelihood* (block number = 0 – block number = 1) menunjukkan model regresi yang baik. *Log Likelihood* pada *logistic regression* mirip dengan pengertian “*sum of squared error*” pada model regresi sehingga penurunan *Log Likelihood* menunjukkan model regresi yang baik (Ghozali, 2013).

3. Menguji Koefisien Regresi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5%. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada *significant p-value* (probabilitas

value), jika *p-value* (significant) $>5\%$, maka hipotesis alternatif ditolak.

Sebaliknya, jika *p-value* $<5\%$, maka hipotesis alternatif diterima

(Ghozali, 2013).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan opini audit terhadap ketepatan waktu LHP LKPD pada pemerintahan provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Variabel ukuran pemerintah daerah provinsi tidak terdukung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian terhadap akun kas dan aset tetap dalam laporan keuangan Provinsi Bengkulu tahun 2010 ini menyebabkan pengelolaan aset yang kurang baik tidak dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu.
2. Variabel kemandirian pemerintah daerah provinsi terdukung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah yang semakin tinggi dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Variabel kekayaan pemerintah daerah provinsi tidak terdukung dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya didukung dengan bukti penerimaannya dalam laporan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 ini menyebabkan pengelolaan PAD yang kurang baik tidak dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu.

4. Variabel opini audit tahun sebelumnya terdukung dalam penelitian ini karena opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu, baik laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan isi dalam laporan keuangan disajikan secara wajar berpengaruh terhadap opini audit yang akan dikeluarkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini didasarkan pada sumber data sekunder pada laporan keuangan pemerintah daerah sehingga variabel yang dilakukan penelitian berdasarkan data yang dipublikasikan.
2. Penelitian ini juga dilakukan dengan analisis tambahan yaitu wawancara pada pemerintahan provinsi Lampung sehingga hasil wawancara hanya dari satu sampel saja.
3. Penelitian ini dan Penelitian sebelumnya dalam ukuran pemerintah tidak memiliki hasil yang signifikan oleh karena itu disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan data penelitian menjadi kuisioner dan menggunakan faktor- faktor seperti besarnya SKPD, tata kelola dan aplikasi sistem agar mendapatkan hasil yang terdukung dalam penelitian selanjutnya.

5.3 Saran

1. Untuk penelitian pada masa mendatang, disarankan untuk menggunakan variabel lain yang diduga akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian diperkecil menjadi pemerintah provinsi saja agar hasil yang didapat dapat berpengaruh terhadap penelitiannya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dalam mengukur ukuran pemerintah daerah menggunakan besaran SKPD.
4. Bagi pemerintah daerah provinsi dapat diharapkan lebih baik dalam pertanggung jawaban pengelolaan aset yang dimilikinya agar dapat tepat waktu dalam melakukan penyajian laporan keuanganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Desmiyawati. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Riau). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2, April 2014 : 163-178.
- Eisenhardt, M. Kathleen. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*. Vol 14, No 1. (1 Jan, 1989), PP 57-74.
- Fachrurozi, luthfi. 2014. Analisis Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada pemerintah daerah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1.
- Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada PerusahaanPerusahaan yang Terdaftar Di BEJ Periode 2004-2006). *Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya*.
- Ilna, Nabila. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kartiko, W.S., Fitriany., dan Siregar, N.P.V.S. 2015. Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muladi, Aris. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Modugu, Kennedy. 2012 Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies. *Journal of Finance and Accounting*. Vol.3, No.6.

- Rosalin, Faristina. 2011 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Semarang: *Skripsi Fakultas Ekonomi Diponegoro*.
- Santosa, B. P. dan Rahayu, R. P.. 2005 Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No. 1.
- Setyaningrum, D. dan Syahfitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Desember 2012, Vol. 9, No. 2, Hal 154 – 170.
- Sinaga, Y. F. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela oleh Pemda. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R..2011 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol.8, No.1, November 2011: 1-94.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sukoco, Agus. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Jakarta: *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sulistyo. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Semarang: Skripsi. 100 hlm.
- Sutaryo, dan Carolina, O. 2014. Ketepatan Waktu Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*.
- Trisnawati, D. M. dan Achmad, K..2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*.
- [Http://www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. DPR RI. Jakarta.

- _____. 2004. *Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2006. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. DPR RI. Jakarta.
- _____. 2011. *Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.